



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Sifat Rapat	: Terbuka
Rapat ke	: 20 (dua puluh)
Hari/Tanggal	: Senin, 9 Juli 2018
W a k t u	: Pukul 11.00 s.d 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	: H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F.Gerindra).
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan, S.IP. (Plt. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	: 1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019; 2. Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
Hadir	: 1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Ketua KPPU beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Ketua KPPU dibuka pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah dalam rangka membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Ketua KPPU untuk menjelaskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Ketua KPPU.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-268/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar

Rp130.297.030.000,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) dalam Program Pengawasan Persaingan Usaha.

2. Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp36.557.100.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk mendukung program prioritas nasional nomor 1 dan nomor 3, sehingga total Anggaran KPPU Tahun 2019 sesuai dengan usulan awal KPPU sebesar Rp166.854.130.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Prioritas sebesar Rp62.399.600.000,00
 - a. Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha, sebesar Rp14.597.000.000,00
 - b. Pengawasan Kemitraan, sebesar Rp7.562.000.000,00
 - c. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebesar Rp7.600.000.000,00
 - d. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat, sebesar Rp 4.500.000.000,00
 - e. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha, sebesar Rp16.000.000.000,00
 - f. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja KPD KPPU, sebesar Rp8.140.600.000,00
 - g. Penilaian Merger dan Akuisisi, sebesar Rp4.000.000.000,00
 - 2) Pendukung (Non Prioritas), sebesar Rp43.342.020.000,00
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebesar Rp19.239.611.000,00
 - b. Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga, sebesar Rp20.322.399.000,00
 - c. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebesar Rp1.360.714.000,00
 - d. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran, sebesar Rp2.419.296.000,00

Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019 tersebut akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

Catatan:

- 1) Program Prioritas Nasional Nomor 1 adalah Program Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Layanan Dasar dalam kegiatan prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan.
- 2) Program Prioritas Nasional Nomor 3 adalah Program Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif dalam kegiatan prioritas Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.